

bahwa konsep dari makna yang dihasilkan oleh individu dikonstruksi berdasarkan kumpulan pengetahuan (*stock of knowledge*) individu yang dipengaruhi oleh pengalaman-pengalamannya. Realitas dari sebuah objek nyata merupakan keterkaitan individu terhadap objek tersebut (Bungin, 2008:3).

Fenomenologi

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, ‘phainomenon’ yaitu “yang menampak”. Fenomenologi pertama kali dicetuskan oleh Edmund Husserl. Fenomenologi dikenal sebagai aliran filsafat sekaligus metode berfikir yang mempelajari fenomena manusiawi tanpa mempertanyakan penyebab dari fenomena tersebut serta realitas objektif dan penampakannya. Tujuan utama fenomenologi ialah mempelajari bagaimana fenomena dialami alam kesadaran, pikiran dan dalam tindakan, seperti bagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis. Fenomenologi mencoba mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep-konsep penting, dalam kerangka intersubjektivitas (Kuswarno, 2009:2).

Alfred Schutz adalah ahli teori fenomenologi yang paling menonjol sekaligus yang membuat fenomenologi menjadi ciri khas bagi ilmu sosial hingga saat ini. Bagi Schutz, tugas utama fenomenologi ialah mengkonstruksi dunia kehidupan manusia “sebenarnya” dalam bentuk yang mereka sendiri alami. Realitas dunia tersebut bersifat intersubjektif dalam arti bahwa anggota masyarakat berbagi persepsi dasar mengenai dunia yang mereka internalisasikan melalui sosialisasi dan memungkinkan mereka melakukan interaksi atau komunikasi (Kuswarno, 2009: 110).

Inti pemikiran Schutz adalah bagaimana memahami tindakan sosial melalui penafsiran. Dimana, tindakan sosial merupakan tindakan yang berorientasi pada perilaku orang atau orang lain pada masa lalu, sekarang dan akan datang. Proses penafsiran dapat digunakan untuk memperjelas atau memeriksa makna yang sesungguhnya, sehingga dapat memberikan konsep kepekaan yang implisit. Dengan kata lain, mendasarkan tindakan sosial pada pengalaman, makna dan kesadaran. Manusia mengkonstruksi makna diluar arus utama pengalaman melalui proses “tipikasi”. Hubungan antara makna pun diorganisasikan melalui proses ini, atau biasa disebut *stock of knowledge*. (Kuswarno, 2009 : 18). Untuk menggambarkan keseluruhan tindakan seseorang Schutz mengelompokkannya dalam dua fase, yaitu:

- a) *Because motives (Weil Motiv)*, yaitu tindakan yang merujuk pada masa lalu. Dimana, tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki alasan dari masa lalu ketika ia melakukannya.

- b) *In-order-to-motive (Um-zu-Motiv)*, yaitu motif yang merujuk pada tindakan di masa yang akan datang. Dimana, tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Sejalan dengan paradigma penelitian yang digunakan, Untuk mengungkap dan menjelaskan tentang kontruksi makna ketrwakilan perempuan sebagai komunikator politik bagi anggota dewan perempuan DPRD Provinsi Riau periode 2014-2019 dari sudut pandang mereka sendiri, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tradisi fenomenologi. Metode penelitian kualitatif pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif, dan peneliti terlibat dalam situasi dan *setting* fenomena yang diteliti. Makna tentang obyek yang diamati dalam penelitian ini dibawa oleh subyek penelitian yaitu anggota legislatif perempuan kepada peneliti.

Informan penelitian terdiri dari 5 orang anggota DPRD perempuan yang 2 orang ketua fraksi, dan wakil ketua DPRD Provisnsi Riau periode 2014-2019. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam, pengamatan (*observasi*) dan studi pustaka. Analisa data dilakukan dengan mereduksi berbagai pernyataan anggota legislatif tersebut sekaligus melakukan interpretasi terhadap kecenderungan-kecenderungan atas pendapat yang mereka kemukakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan ini menguraikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam, dialog dan pengamatan (*observasi*) oleh peneliti baik secara formal maupun informal di beberapa kesempatan seperti rapat dan kunjungan kerja maupun pertemuan insedentil dengan informan di tempat-tempat lainnya. Wawancara mendalam dan observasi dilakukan oleh peneliti secara intensif mulai bulan April 2015 sampai dengan bulan September 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif sebagaimana telah dibahas pada bab metodologi penelitian. Penelitian dengan pendekatan kualitatif sebagaimana telah diungkapkan beberapa ahli (Bogdan dan Taylor, 1975:5), Bogdan dan Biglen, 1990:2, Miles dan Huberman, 1993:15, Moleong, 1993:5, Brannen, 1997:1) bahwa metode penelitian kualitatif ini sangat bergantung pada pengamatan mendalam terhadap perilaku manusia dan lingkungannya. Untuk memperkuat hasil penelitian maka digunakan perspektif interpretif dengan pendekatan fenomenologi dari Alfred Schutz. Hasil penelitian ini memuat profil politisi perempuan dan realitas komunikasi politik politisi perempuan anggota DPRD Provinsi Riau, dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi

Motif Anggota Legislatif Perempuan DPRD Provinsi Riau Terlibat dalam Ranah Politik

Berkiprah di dunia politik bagi kelima perempuan anggota legislative Riau periode 2014-2019, bukan dilatarbelakangi oleh faktor euphoria politik atau ikut-ikutan semata. Tapi terjun ke dunia politik karena dorongan kuat yang ada pada dirinya untuk berbuat lebih banyak di areal public. Beragam latar belakang yang membentuk dan kemudian mengantarkan politisi perempuan melibatkan diri dalam ranah politik praktis dan tetap eksis tidak terlepas pula karena adanya motif yang mendasari keterlibatan informan menggeluti dunia politik. Dalam hal ini motif sebagai faktor-faktor yang ada dalam diri individu politisi perempuan yang menjadi subyek dalam penelitian ini mempengaruhi dan mendasari tindakan yang dilakukan yang berlangsung melalui proses berfikir secara sadar disadari oleh para informan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pengamatan maupun wawancara mendalam dengan 5 politisi perempuan anggota DPRD Provinsi Riau sebagai informan dalam penelitian ini, dengan perspektif yang digunakan yaitu fenomenologi Alfred Scutz, ditemukan 2 kategori tentang motif informan melakukan tindakan dan perilaku dalam kapasitasnya sebagai politisi anggota DPRD Provinsi Riau, yaitu motif karena (because motive) dan motif tujuan atau harapan (in order to motive)

Motif karena (because motive) sebagai motif yang menggambarkan alasan atau latar belakang yang mendasari tindakan informan sebagai politisi, penelitian terhadap 70 orang politisi perempuan di DPRD Provinsi Riau, hasilnya mengidentifikasi adanya motif informan terhadap dorongan untuk menjadi politisi tersebut ternyata dapat dikategorikan sebagai dorongan yang muncul dari dalam diri sendiri sebagai dorongan yang kuat dengan segala eksistensinya yang melekat di dalamnya, serta dorongan yang muncul dari luar yang ternyata dorongan itu tidaklah sekuat dorongan yang muncul dari dalam diri sendiri. Hal ini akan membawa suatu konsekuensi yang nyata terhadap semangat, niat yang sungguh-sungguh dan ambisi masing-masing politisi perempuan dalam setiap aktivitas selama masa rangkaian kinerja di DPRD Provinsi Riau periode 2014-2019.

Jika ditinjau dari motif yang melatarbelakangi (because motif) informan untuk menjadi politisi perempuan yang duduk di lembaga legislative DPRD Provinsi Riau, peneliti mendapatkan jawaban yang beragam. Dari hasil wawancara dengan para informan tentang motif penggugah yang mendorong mereka berkecimpung di dunia politik sebagai politisi maka hasilnya dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Motif Karena (*because motive*) Informan menjadi Politisi

No	Motif Karena (<i>because motive</i>)	Informan
1	Dorongan Keluarga	Farida dan Almainis
2	Diusung Partai	Mila Roza
3	Jiwa aktivis dan keinginan terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan	Sumiyanti , Ade Hartati

Terkait dengan motif yang telah diuraikan oleh informan, tentang daya dorong yang melatarbelakangi informan menjadi politisi dalam penelitian ini, ditemukan pula adanya motif lain yaitu motif harapan. Motif harapan yang dimaksudkan sebagai suatu tujuan yang ingin di capai oleh informan politisi perempuan yang menjadi informan dalam penelitian ini. Motif harapan sebagai suatu tindakan yang merujuk pada masa yang akan datang yang oleh Schutz disebut sebagai “*in order to motive*”. Motif harapan ini yang kemudian mempengaruhi dan menentukan segala tindakan informan sebagai politisi perempuan anggota DPRD Provinsi Riau

Hasil penelitian terhadap 5 informan menunjukkan adanya keberagaman motif tujuan atau harapan informan yaitu, harapan bahwa peran serta mereka akan memberi kontribusi untuk memajukan kaum perempuan dan peran sertanya di dunia publik, harapan berkontribusi bagi terciptanya kehidupan politik yang sehat dan dinamis, serta harapan bahwa perempuan semakin percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya.

Harapan yang menjadi tujuan utama sebagai motif harapan yang digambarkan dalam tindakan dan perilaku politisi perempuan anggota DPRD Provinsi Riau sebagai informan dalam penelitian ini, sebagaimana paparan di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Motif Harapan (*in order to motive*) Informan Sebagai Politisi Anggota DPRD

No	Motif	Informan
1	Harapan menghilangkan intimidasi dari berbagai pihak kepada perempuan untuk pengambilan keputusan	Almainis
2	Harapan memaksimalkan perjuangan dan fungsi perempuan dalam membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak	Sumiyati

3	Harapan perempuan semakin menunjukkan kredibilitas dengan kinerja yg baik dan professional yang dimiliki dan percaya diri	Ade Hartati, Farida ,dan Mira
---	---	-------------------------------

Pemaknaan Keterwakilan Perempuan sebagai Komunikator Politik (Quota 30%) oleh Anggota Legislatif DPRD Provinsi Riau 2014-2019

Peran perempuan dalam perancangan politik di DPRD Provinsi Riau menunjukkan sedikit perubahan walau belum secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah partisipasi perempuan di DPRD provinsi Riau dua periode terakhir, yaitu periode 2009-2014 anggota dewan perempuan di DPRD Provinsi Riau hanya berjumlah 10 (sepuluh) orang, sedangkan pada periode 2014-2019 meningkat menjadi 18 (delapan belas) orang dari jumlah 65 kursi. Di antara 18 orang tersebut, Golkar merupakan partai terbanyak yang mengirimkan kader perempuannya di DPRD Riau, yang jumlahnya mencapai 7 orang (Nuraini, Karmila Sari, Sumiyanti, Sewitri, Septina Primawati, Sulastri, Supriati). Sementara Demokrat 3 orang (Eva Yuliana, Maghdalisni, Yulianti), PDI Perjuangan 2 orang (Almainis, Soniwati), PPP 2 orang (Yurnalis, Tengku Nazlah Khairati), Gerindra 1 orang (Lampita Pakpahan), PAN 1 orang (Ade Hartati Rahmat), PKS 1 orang (Mira Roza), NasDem 1 orang (Farida H Asad). Adapun 10 nama anggota DPRD Riau dari kalangan perempuan periode 2009-2014 yakni, Iwa Sirwani Bibra, Supriati, Rosvanilda Zulher, Sumiyanti, Elly Suryani (Golkar), Almainis (PDI Perjuangan). Selanjutnya, Tengku Nazlah Khairati (PPP), Mukhniarti (Demokrat), Lampita Pakpahan (PPRN), Gustini Julianti (PKB). Hal ini . menggambarkan bahwa ada peningkatan partisipasi atau kemauan para perempuan di Riau untuk melakukan pelibatan di arena politik.

Manusia merupakan makhluk dinamis yang bisa bebas menentukan pilihan perilaku. akan tetapi walaupun bebas, namun tetap terikat pada aturan dan hukum yang disepakati atas dasar pemaknaan bersama. Sesuatu tidak akan bermakna apa-apa ketika individu tidak memberikan makna apa-apa terhadap sesuatu itu. Dengan demikian makna tidak dapat berdiri dengan sendirinya karena individu adalah yang memberi makna.

Makna bersifat subyektif dan cair, makna tersebut berkembang dan disempurnakan melalui interaksi yang berlangsung. Makna atau pemaknaan merupakan akumulasi dari berbagai potensi dalam kehidupan seseorang dan bagaimana seseorang merespon sesuatu objek berdasarkan makna-makna yang dikandung komponen-komponen tersebut yang ditemui dilingkungan kehidupannya.

Pemaknaan keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik oleh politisi perempuan yang menjadi informan dalam penelitian ini ditemukan memiliki

pemaknaan yang berbeda-beda. Pemaknaan informan tentang keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik di lembaga legislatif secara umum bagi informan merupakan kesempatan yang akan membuat perempuan lebih berdaya untuk terlibat dalam berbagai permasalahan yang tidak mendapat perhatian selama ini di Indonesia. Misalnya Angka kematian Ibu yang tinggi, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan sebagainya.

Keterwakilan perempuan 30 % akan membuat perempuan lebih berdaya untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan perempuan Indonesia yang masih rendah. Makna lain yang terungkap adalah bahwa. Keterwakilan perempuan minimal 30% akan membuat perempuan lebih berdaya untuk terlibat dalam pembuatan budget berspekpektif gender. Penggunaan analisa bersperspektif gender. Penggunaan analisa berperspektif gender akan meningkatkan efektivitas kebijakan sehingga penggunaan uang public juga akan memperhatikan perspektif gender tersebut. Oleh karena itu Pemaknaan informan tentang ketrwakilan perempuan sebagai komunikator politik di lemabga legislative adalah bentuk tanggung jawab dalam keberlangsungan kehidupan sosial bermasyarakat.

Dari penjelasan para informan tentang pemaknaan keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik oleh anggota DPRD Provinsi Riau bahwa informan memiliki pemaknaan yang berbeda-beda. Perbedaan pemaknaan pada dasarnya dipengaruhi keunikan cara berfikir, dan latar belakang individu, pengalaman masa lalu dan pemahaman politisi perempuan yang kemudian diinterpretasikan secara berbeda dalam mengkonstruksi makna keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik. Konstruksi pemaknaan para informan tentang pemaknaan keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik yang dimaksudkan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3
Pemaknaan Keterwakilan Perempuan sebagai Komunikator Politik

No	Pemaknaan keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik (quota 30%)	Informan
1	Memaknai sebagai kompensasi atas hambatan-hambatan aktual yang mencegah perempuan dalam keterlibatan secara adil dalam posisi politik/bukan diskriminasi	Ade Hartati
2	Memaknai sebagai sarana yang menunjukkan hak representasi setara dan langkah maju bagi perempuan terjun ke dunia politik	Farida
3	Memaknai sebagai sarana yang menunjukkan	Mira Roza, Almainis

	pengalaman perempuan diperlukan dalam kehidupan politik	
4	Memaknai sebagai ukuran kualifikasi perempuan dinilai rendah dan diminimalkan dalam sistem politik yang didominasi laki-laki	Sumiyanti

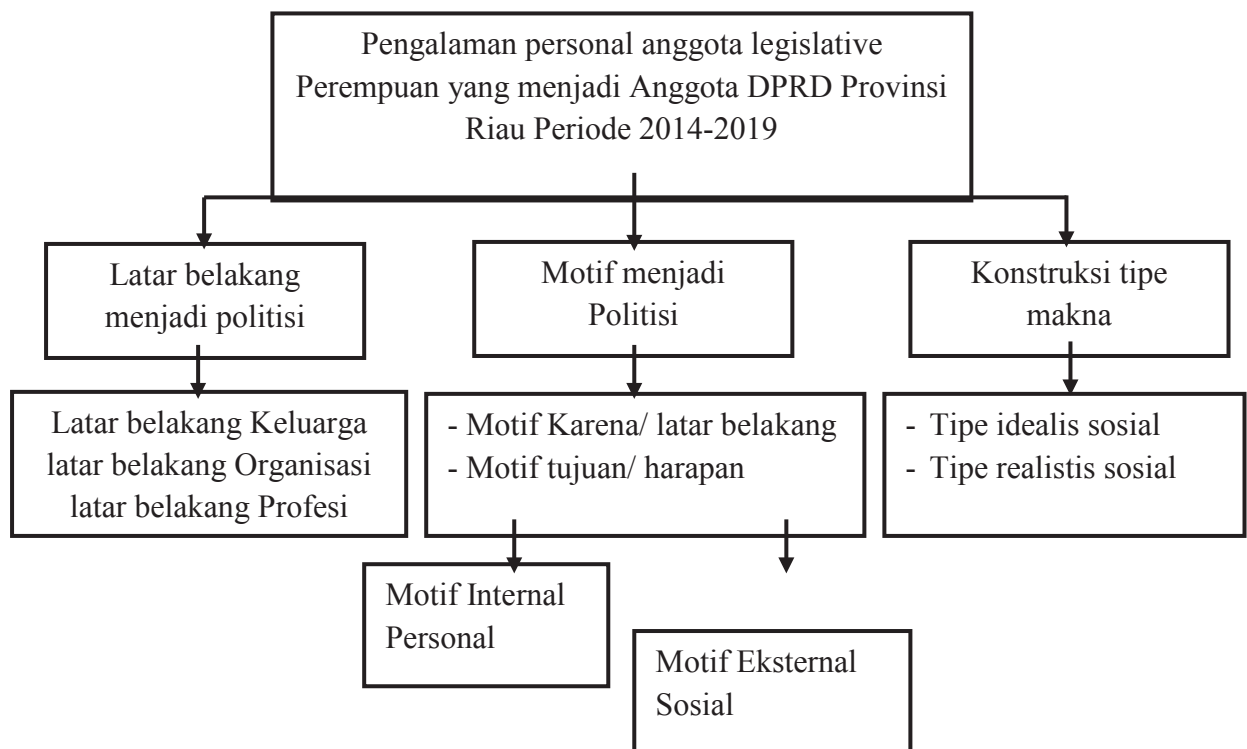
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan politisi perempuan yang menjadi informan dalam penelitian ini mengenai keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik dengan quota 30% ditemukan memiliki pemaknaan yang berbeda-beda. Pemaknaan informan tentang keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik dengan quota 30% secara umum bagi informan merupakan kompensasi atas hambatan-hambatan actual yang mencegah perempuan terlibat secara adil dalam posisi politik, dan bukan sebuah diskriminasi. Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mempunyai hak representasi setara dalam mengakomodasi dan mengarahkan program-program pembangunan dan dimaknai sebagai peluang meningkatkan peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan-keputusan publik. Makna lain yang terungkap adalah bahwa pengalaman perempuan diperlukan dalam kehidupan politik. Di lain hal keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik dengan quota 30% dimaknai sebagai sebuah ukuran yang menunjukkan meskipun kualitas perempuan dinilai sama dengan laki-laki namun kualifikasi perempuan dinilai rendah dan diminimalisasikan dalam sistem politik yang didominasi laki-laki.

Konstruksi pemaknaan informan tentang pemaknaan keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik dikategorisasikan dalam sebelumnya dikategorisasikan dalam dua kategorisasi tipe makna. Tipe pertama adalah makna idealis sosial. Dalam pandangan tipe makna idealis sosial informan memaknai keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik di lembaga legislatif dengan quota 30% sebagai batasan perempuan untuk terlibat dalam dunia politik menghadapi dominasi politik laki-laki dan menunjukkan kualifikasi perempuan masih rendah sehingga diminimalkan dalam sistem politik. Tipe kedua adalah tipe makna realistik sosial, pada tipe ini informan memaknai keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik di lembaga legislatif dengan quota 30% sebagai kesempatan/ peluang perempuan lebih maju untuk terjun ke dunia politik dan sebagai kompensasi hambatan-hambatan yang mencegah perempuan terlibat secara adil yang memberi kemudahan akses untuk mengakomodasi dan mengarahkan program-program pembangunan, dan kesempatan merealisasikan idealisme sebagai bentuk sosial kontrol terhadap jalannya roda pemerintah dalam kehidupan sosial masyarakat di daerah Provinsi Riau

Maka konstruksi pemaknaan informan berdasarkan kategorisasi tipe makna informan mengenai keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik di lembaga

legislative DPRD Provinsi Riau sebagaimana telah diuraikan diatas dapat digambarkan dalam model seperti di bawah ini :

Gambar
Konstruksi tipe pemaknaan Keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik



PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kontruksi makna keterwakilan perempuan sebagai komunikator politik anggota legislative , studi fenomenologi politisi perempuan di DPRD Provinsi Riau, maka peneliti menemukan kesimpulan sebagai berikut : Motif politisi perempuan sebagai anggota DPRD provinsi Riau dilatarbelakangi oleh Motif karena (because motive) meliputi Dorongan keluarga Dorongan partai Dorongan jiwa aktivis dan keinginan terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan. Adapun Motif tujuan (in order to motive): adalah harapan menghilangkan intimidasi dari berbagai pihak kepada perempuan untuk pengambilan keputusan, harapan memaksimalkan perjuangan dan fungsi perempuan dalam membuat

kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak, dan harapan perempuan semakin menunjukkan kredibilitas dengan kinerja yg baik dan professional yang dimiliki dan percaya diri.

.Pemaknaan Keterwakilan Perempuan sebagai Komunikator Politik bagi Anggota Dewan Perempuan DPRD Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan adanya pemaknaan yang berbeda-beda yakni; memaknai sebagai kompensasi atas hambatan-hambatan aktual yang mencegah perempuan dalam keterlibatan secara adil dalam posisi politik/bukan diskriminasi, memaknai sebagai sarana yang menunjukkan pengalaman perempuan diperlukan dalam kehidupan politik . memaknai sebagai sarana yang menunjukkan hak representasi setara dan langkah maju bagi perempuan terjun ke dunia politik .

Dari hal tersebut diatas disarankan Politisi perempuan hendaknya merekonstruksi motif yang mendasari keterlibatannya di ranah publik. Motif sebagai anggota DPRD hendaknya tidak hanya sebatas sebagai ajang pembuktian kemampuan menembus ranah publik semata, tetapi sejatinya diaktualisasikan melalui kinerja, dedikasi dan loyalitas yang optimal dan kapabel dalam melaksanakan fungsi dan perannya dengan kinerja yang nyata sebagai pengemban amanah rakyat. Eksistensi politisi perempuan dalam kapasitasnya sebagai anggota parlemen seyogyanya tidak hanya karena diuntungkan oleh wild card dari affirmative action dan sekedar sebagai pelengkap atau aksesoris politik dan pemanis ruang publik belaka, tetapi merupakan figure yang memiliki komitmen kuat untuk proaktif, responsive dan kapabel dalam penguasaan masalah, untuk memperkuat konstruksi dan bargaining position politiknya dalam perannya merumuskan, memutuskan dan mengawal keputusan atau kebijakan-kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi Sanit. 1985. *Perwakilan Politik Indonesia*, Jakarta : CV.Rajawali
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann. 1966. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- Budiardjo, Miriam. 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Dan Nimmo. 2005. *Komunikasi politik; komunikator, Pesan, dan media*. Bandung: Rosdakarya
- Jalaludin Rakhmat, 2005, *Psikologi Komunikasi*, edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2005. *Metode penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Effendy, Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung 2005
- Harun, Rochajat, dan Sumarno. (2006). *Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Juliastuti, Nuraini. 2000. *Mengontrol Perempuan. (Newsletter KunciMaskulinitas - 5832)*. Yogyakarta: KUNCI Cultural Studies Center. (Edisi 8 September 2000).
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Metode Penelitian Komunikasi Fenomenologi*, Bandung : Widya Padjadjaran
- Mulyaha, Deddy. 2002. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Schutz, Alfred. 1972. *The Phenomenology of the Social Word*. London: Heinemann Educational Book.
- Trafton, M. Barbara (1984), *Women Winning: How to Run For Office*, NJ, The Harvard Common Press
- Rakhmat, Jalaluddin. 2005. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Wood, Julia T. 2004. *Communication Theories In Action*. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
- <http://eprints.undip.ac/9634>